2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL DIY

Jl. Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta

Telp/Fax : (0274) 514932, 563510

Website : http://dinsos.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Sosial DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* untuk penanganan darurat. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Sosial DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Kepala Dinas Sosial DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISSOS

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si

NIP. 19660404 199303 2 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”:

   - Diukur dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial (Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2)). Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Persentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+%Fakir Miskin+%BRTPD+%BPRSW+%BRSBKL%BPRSR+%BRSPA+%BPSTW dibagi 9

   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yakni Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.

   - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 44,28%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 47,27%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target, bahkan melebihi target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,75%.

   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 94,96% terjadi peningkatan sebesar 11,79%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”:

   - Diukur dengan persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2)). Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + %karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebanyak 51,60 sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 65,34%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 126,63%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 134,99% terjadi penurunan sebanyak 8,36%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Berita Resmi Statistik No. 42/07/34/Th.XXIV yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2022 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dengan persentase sebesar 11,34% dan di bulan September 2022 mengalami kenaikan menjadi 463,63 ribu orang dengan persentase sebesar 11,49% (Berita Resmi Statistik No. 07/01/34/Th.XXV). Sedangkan berdasarkan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) Periode SK 29 Desember 2022 tercatat sebanyak 2.132.800 warga DIY yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

   Pemberian bantuan sudah diberikan bagi masyarakat DIY, baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial diberikan bagi masyarakat yang sudah tidak produktif, dan bagi masyarakat yang masih produktif, diberikan pemberdayaan sosial dalam bentuk pendampingan dan koordinasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), pendampingan dan koordinasi UEP (Usaha Ekonomi Produktif) PKH (Program Keluarga Harapan), dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) PKH (Program Keluarga Harapan) Graduasi melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

2. Berdasarkan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinsos DIY tahun 2022, populasi terbesar dari anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial adalah anak terlantar dan anak balita terlantar, yang jumlahnya sebesar 5.631 anak. Anak terlantar dan anak balita terlantar ini merupakan anak yatim piatu yang memiliki keluarga atau kerabat dengan ekonomi yang tidak berkecukupan atau tinggal di dalam keluarga miskin sehingga mengalami hambatan perkembangan dan fungsi sosialnya. Paradigma

bahwa penanganan anak terlantar dan anak balita terlantar melalui pelayanan dalam panti menjadi solusi pilihan, saat ini tidak relevan seiring dengan bergesernya kebijakan nasional yang menekankan bahwa pentingnya pengasuhan berbasis keluarga, bukan pengasuhan dalam panti/lembaga, maka pengasuhan dalam panti hanya sebagai alternatif terakhir dalam penanganan anak terlantar dan anak balita terlantar.

Selanjutnya, masih menggunakan dasar yang sama, yaitu Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinsos DIY tahun 2022 bahwa anak dengan kedisabilitasan menempati posisi kedua dengan jumlah 2.012 anak. Anak dengan kedisabilitasan ini belum terpenuhi haknya untuk bisa menikmati pendidikan di Sekolah Inklusi, padahal disebutkan dengan jelas dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan , jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Namun hingga saat ini belum terjadi perubahan perspektif terhadap pentingnya inklusivitas dalam masyarakat, khususnya inklusivitas bagi anak dengan kedisabilitasan.

3. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinsos DIY tahun 2022 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 28.137 orang. Sedangkan untuk anak dengan kedisabilitasan sendiri sebanyak 2.012 anak. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kepada Pemerintah, baik Pemerintah Daerah atau pun Pemerintah Kab/Kota, dan masyarakat agar turut serta membantu memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.

4. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Laut Jawa, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan *karts* dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar

belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.

5. Usia harapan hidup di DIY selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya usia harapan hidup ini menghasilkan kelompok lanjut usia terlantar yang juga ikut meningkat. Jumlah lanjut usia terlantar DIY berdasarkan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinas Sosial DIY 2022, bahwa terdapat 26.525. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan layanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat mewujudkan lanjut usia terlantar yang sejahtera. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lanjut Usia hadir sebagai payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak dalam mengimplementasikan kesejahteraan bagi lanjut usia terlantar. Saat ini program pelayanan lanjut usia terlantar yang ada mengarah kepada pemberian jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok guna menjamin keberlangsungan hidup lanjut usia terlantar.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif 3
Daftar Isi 7
Daftar Tabel 8
Daftar Gambar 9
BAB I Pendahuluan 10
Pendahuluan 10
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 10
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 12
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 13
1.4 Isu-Isu Strategis 14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 16
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 20
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 23
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 23
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 25
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022 25
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 31
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 36
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja 38
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 38
3.2 Capaian Kinerja Lainnya 56
3.3 Efisiensi Anggaran 59
3.4 Inovasi 60
BAB 4 Penutup 68
L A M P I R A N 70

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial DIY, 2017-2022 17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial DIY Tahun 2022 21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 23
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 23
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 24
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1 26
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja 27
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 28
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 29
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 30

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja 9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Sosial DIY 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Sosial DIY 11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 22

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Sosial DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 *Cascading Kinerja*

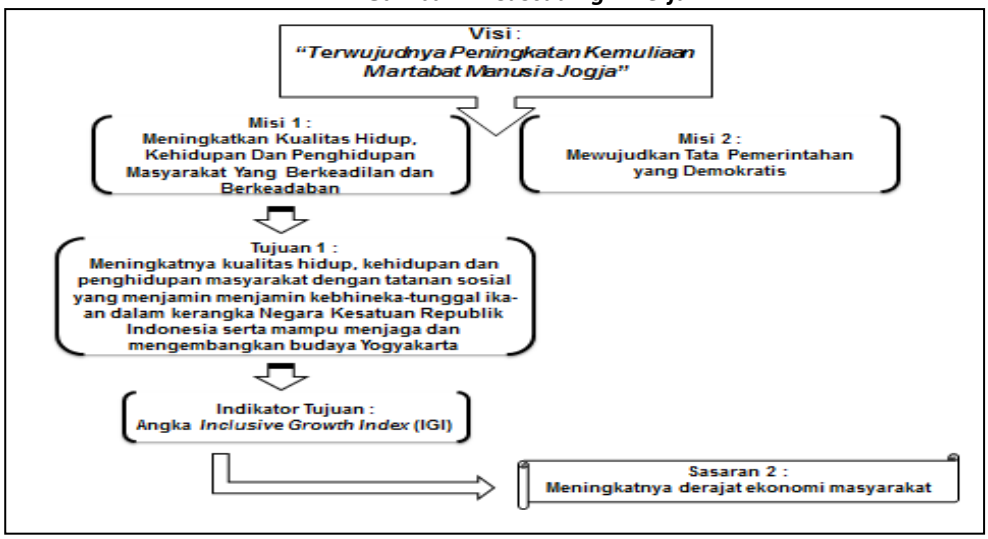

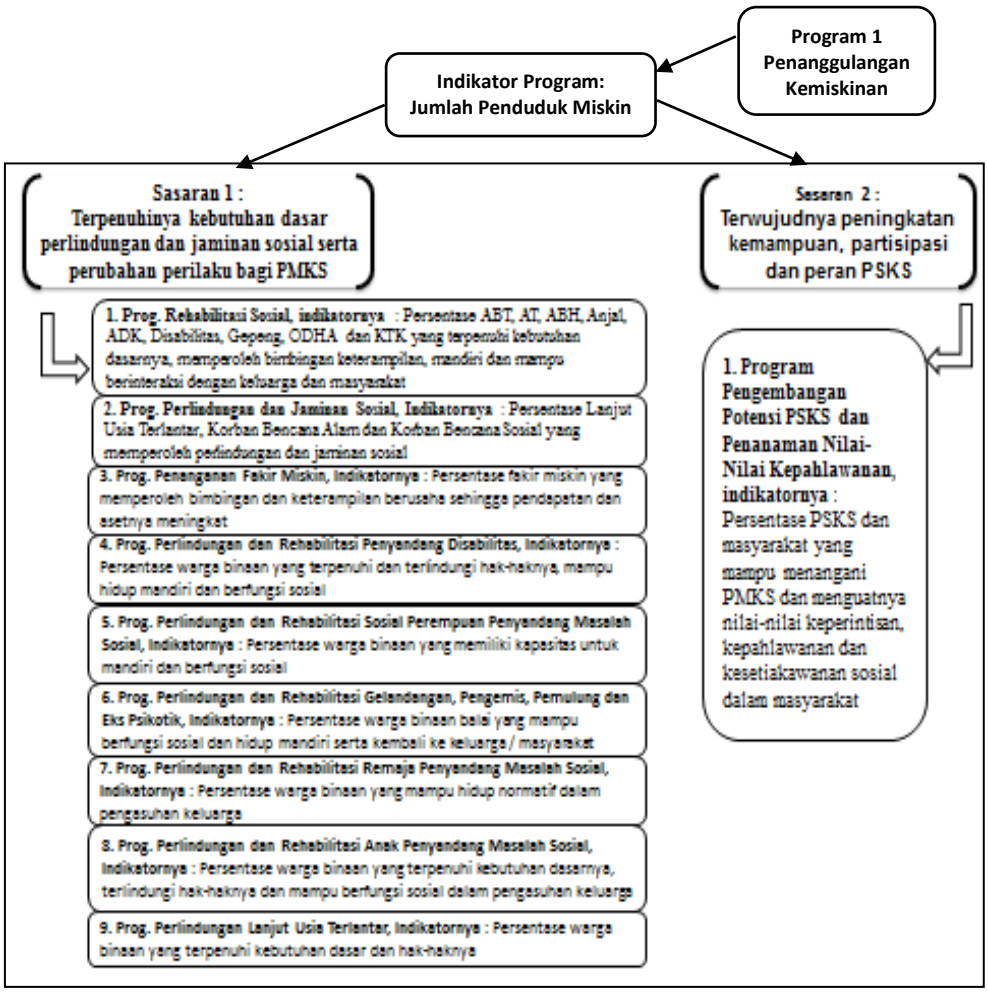

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Sosial DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Sosial DIY

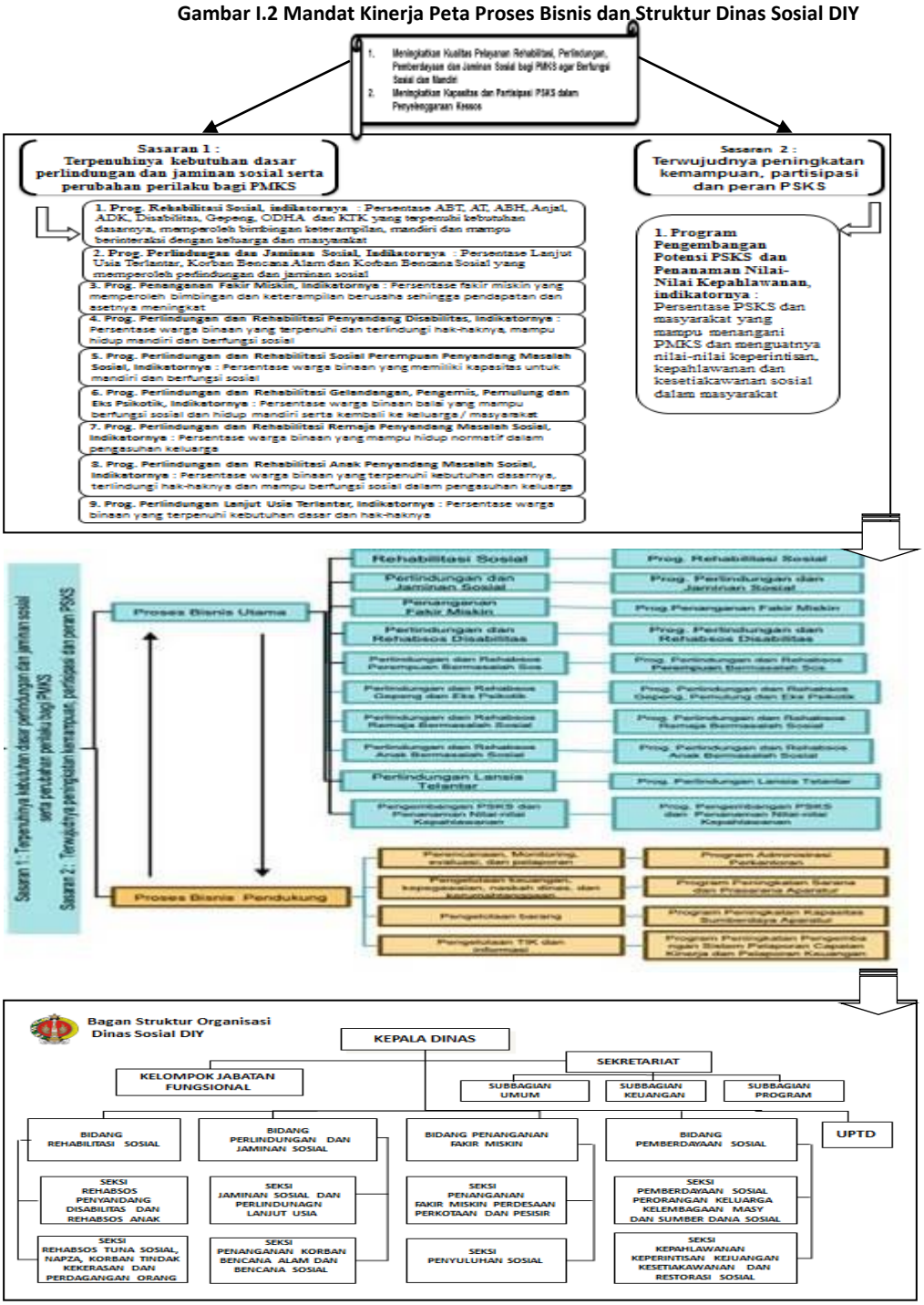

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Sosial DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Sosial DIY

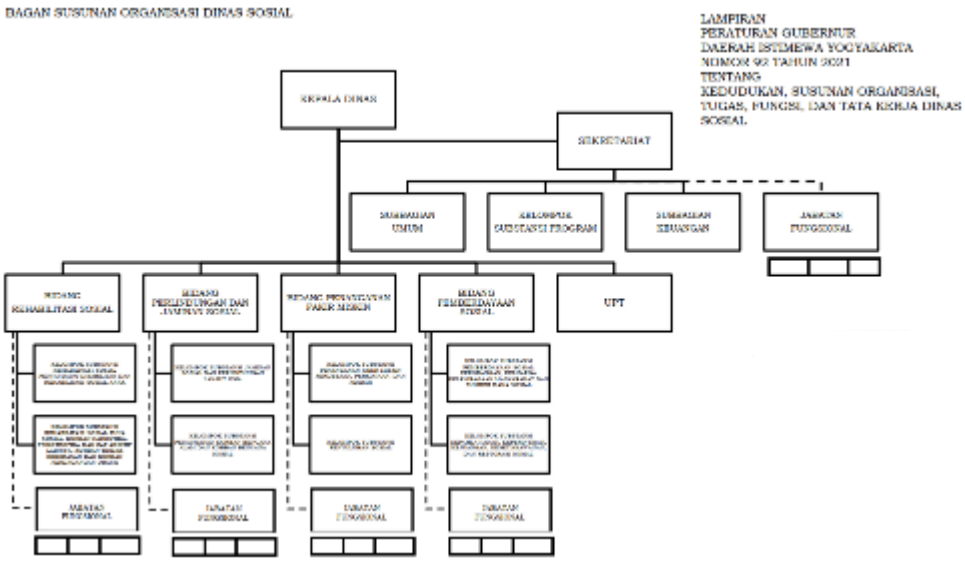

Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial menetapkan bahwa Dinas Sosial DIY mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh Kepala Dinas. Penjabaran dari struktur organisasi Dinas Sosial DIY terdiri :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
    1. Subbagian Umum
    2. Subbagian Keuangan
    3. Kelompok Substansi Program
c. Bidang Rehabilitasi Sosial
    1. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak
    2. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang
d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia
2. Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

e. Bidang Penanganan Fakir Miskin
1. Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir
2. Kelompok Substansi Penyuluh Sosial

f. Bidang Pemberdayaan Sosial
1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial
2. Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

g. Unit Pelaksanaan Teknis terdiri atas :
1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)
2. Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)
3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)
4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)
5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)
6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis pada Dinas Sosial DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ”Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta Meningkatkan kapasitas dan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan saling terkait dengan munculnya permasalahan sosial lainnya, baik sebagai penyebab ataupun sebagai dampak. Kemiskinan merupakan isu krusial yang harus ditangani dengan berbagai program dan kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan menjadikan kemiskinan sebagai isu utama, intervensi permasalahan kesejahteraan sosial diharapkan dapat

menimbulkan efek domino dalam mengatasi permasalahan sosial lainnya.

2. Anak sebagai gerakan penerus pembangunan di masa depan membutuhkan perlindungan dari berbagai masalah sosial yang dapat menimpa mereka. Isu ketelantaran anak berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks di DIY dan memerlukan penanganan. Peningkatan kriminalitas terkait anak, baik sebagai korban atau pun menjadi pelaku tindakan kriminal menuntut kehadiran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan anak menjadi salah satu prioritas Dinas Sosial DIY.
3. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan masih belum terlaksana secara ideal. Dinas Sosial DIY memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik dalam hal kebijakan maupun intervensi langsung pelayanan kesejahteraan sosial. Terlebih *pasca pandemic Covid 19,* penyandang disabilitas perlu mendapatkan prioritas untuk memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah agar memiliki akses yang sama sebagai warga masyarakat.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Laut Jawa, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan *karts* dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.

5. Jumlah lanjut usia terlantar DIY berdasarkan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinas Sosial DIY 2022 sebanyak 26.525 orang. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lanjut Usia hadir sebagai payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak dalam mengimplementasikan kesejahteraan lanjut usia terlantar. Saat ini program pelayanan lanjut usia terlantar yang ada mengarah kepada pemberian jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok guna menjamin keberlangsungan hidup lanjut usia. Hingga saat ini DIY belum

mempunyai pelayanan yang lebih luas untuk menjamin hari tua yang mandiri, aman, tenteram, dan bahagia. Pemerintah perlu mengupayakan kejehateraan bagi lanjut usia terlantar dan melaksanakan regulasi tentang perlindungan lanjut usia terlantar di DIY.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml		Kualifikasi						Laki	Perempuan
1	2	3	4				5		6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	D2	SMA	SLTP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1								1
B.	Jabatan Administrasi															
	1. Administrator	11		11			11	6	5						9	2
	2. Pengawas	16		16			16	1	15						9	7
	3. Pelaksana	242		95	147		127	4	35	28	0	53	3	4	51	76
C.	Jabatan Fungsional	83		30	53		65	7	26	23	4	5	0	0	27	38
	Jumlah	353	1	152	200		220	19	81	51	4	58	3	4	96	124

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial DIY Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, di dominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 81 orang (36,82%) , jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (8,63%), D3 sebanyak 51 orang, (23,20%) D2 sebanyak 4 orang(1,81%), SLTA sebanyak 58 orang, (26,36)% SMP sebanyak 3 orang (1,36%) dan SD sebanyak 4 orang (1,81%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; dengan persentase 56 % pegawai perempuan berbanding 44 % pegawai laki-laki. Untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 133 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 113 pejabat pelaksana administratif serta 18 pejabat fungsional. Di lingkungan Dinas Sosial Induk terdapat 2 orang pejabat

struktural Eselon-4, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Subbagian Umum.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	**TANAH**	**33**	18.705.829.406,00
	TANAH	55	18.705.829.406,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**16.497**	**31.726.261.296,06**
	ALAT BESAR	55	1.377.126.000,00
	ALAT ANGKUTAN	124	6.733.290.454,31
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	495	882.374.320,00
	ALAT PERTANIAN	108	222.660.444,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	13.161	13.095.771.017,12
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	393	1.542.649.709,87
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.248	4.229.080.212,16
	ALAT LABORATORIUM	207	364.994.500,00
	ALAT PERSENJATAAN	34	23.740.000,00
	KOMPUTER	608	3.163.036.226,60
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU – RAMBU	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	64	91.538.412,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**315**	**109.200.508.249,00**
	BANGUNAN GEDUNG	291	108.145.765.696,00
	MONUMEN	19	118.348.623,00
	BANGUNAN MENARA	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5	936.393.930
4	**JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN**	**60**	**2.258.005.395,94**
	JALAN DAN JEMBATAN	3	340.668.000
	BANGUNAN AIR	24	1.312.735.895,94
	INSTALASI	10	233.031.256
	JARINGAN	23	371.570.244
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**1.592**	**635.210.807,00**
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.311	102.263.242
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA	281	532.947.565,00
	HEWAN	0	0

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
6	**KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**11**	**366.905.500,00**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	11	366.905500,00
TOTAL		**18.508**	**162.892.720.654**

Sumber: Data Neraca Dinas Sosial DIY Desember 2022

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022*

Kendaraan operasional Dinas Sosial DIY (induk dan balai) terdiri dari yakni 8 (delapan) unit kendaraan dinas jabatan, 26 (dua puluh enam) unit kendaraan operasional, 4 (empat) unit kendaraan roda tiga 3 (tiga) dan 65 (enam puluh lima) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 80 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp484.200.000**	**Rp484.200.000**	**Rp0**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp484.200.000	Rp484.200.000	Rp0
			Jumlah Pendapatan	**Rp484.200.000**	**Rp484.200.000**	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**			

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp111.082.091.218**	**Rp111.082.091.218**	**Rp0**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp40.972.283.804	Rp40.972.283.804	Rp0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp61.833.407.414	Rp61.833.407.414	Rp0
5	1	05	Belanja Hibah	Rp1.135.600.000	Rp1.135.600.000	Rp0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp7.140.800.000	Rp7.140.800.000	Rp0
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp17.053.086.024**	**Rp17.053.086.024**	**Rp0**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.050.037.016	Rp3.050.037.016	Rp0
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp13.716.678.008	Rp13.716.678.008	Rp0
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp173.337.000	Rp173.337.000	Rp0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp113.034.000	Rp113.034.000	Rp0
			Jumlah Belanja	**Rp128.135.177.242**	**Rp128.135.177.242**	**(Rp484.200.000)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp127.650.977.242)**	**(Rp127.650.977.242)**	**(Rp484.200.000)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial DIY Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Dinas Sosial DIY sebesar Rp 128.135.177.242 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPPA/B.2/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2022.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01197 tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Sosial DIY TA.2021 Rekomendasi: Kepala Dinas Sosial DIY beserta seluruh jajarannya agar melakukan tindakan perbaikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pencapaian target kinerja *(output)*, khususnya *output* kegiatan yang tidak tercapai di Tahun 2021 yaitu antara lain : • Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, khususnya terkait capaian keluaran Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/Penugasan WC *Camp Assesment*; • Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, khususnya terkait capaian keluaran Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia; • Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Pelayanan Reunifikasi ke Keluarga Klien RPS; • Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Covid-19 di *Shelter*; • Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, khususnya terkait capaian keluaran Fasilitasi Perawatan Jenazah Terlantar, Fasilitasi	Dinas Sosial DIY melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) Tahun 2022 dengan langkah-langkah: 1. Pada Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, khususnya terkait capaian keluaran Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/ Penugasan WC *Camp Assesment* terjadi kesalahan pengentrian dalam Aplikasi Sengguh. Seharusnya pada keluaran Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor/Pengurasan WC *Capm Assement* target 10 kali dan terealisasi 10 kali, namun *tertentri* di Aplikasi Sengguh target 10 kali realisasi 5 kali. 2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, khususnya terkait capaian keluaran Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia dari target 5 lokasi terealisasi 2 lokasi, hal ini dikarenakan mengikuti SE Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penundaan Kegiatan Berpotensi Menimbulkan Kerumunan dan mengikuti Instruksi Gubernur DIY No. 17/INTSR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). 3. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Pelayanan Reunifikasi ke Keluarga Klien RPS dari target 23 orang hanya terealisasi 12 orang, hal ini

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan, Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan. 2. Meningkatkan pencapaian target kinerja IKU Tahun 2022 terutama pada indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial agar lebih baik dari Tahun 2021; 3. Melakukan upaya untuk mempertahankan penghargaan-penghargaan lainnya dari *stakeholder*, minimal 3 penghargaan.	dikarenakan pelayanan reunifikasi ke keluarga Klien RPS tidak dapat diprediksi, menyesuaikan kondisi atau kebutuhan reunifikasi yang ada. 4. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Covid-19 di *Shelter* dari target 46 lokasi terealisasi 36 lokasi. Realisasi yang tidak sesuai dengan target ini dikarenakan kasus Covid-19 di DIY sudah mulai menurun, sehingga tidak banyak penyintas yang ada di *shelter,* serta banyak yang melakukan isolasi mandiri dirumah masing-masing. 5. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, khususnya terkait keluaran Fasilitasi Perawatan Jenazah Terlantar target 30 orang realisasi 13 orang, Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan target 286 orang realisasi 206 orang, dan Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan target 850 tangki realisasi 466 tangki merupakan kejadian yang tidak bisa di prediksi untuk pencapaiannya, dan sifatnya persediaan. 6. Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial tahun 2022 tercapai dengan persentase 106,75% dengan target 44,28% dan realisasi 47,27%. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		kenaikan sebesar 11,79%. 7. Tahun 2022, Dinas Sosial DIY mendapatkan 3 penghargaan, yaitu: • Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 atas inovasi Difagana (Difabel Siaga Bencana) sebagai Pionir Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi oleh Kementerian PAN RB. • Penghargaan Kategori OPD Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 28 September 2022. • Penghargaan Ucapan Terima kasih oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Sosial DIY atas dukungan dan kontribusinya dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Sosial DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Sosial DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya derajat ekonomi masyarakat yang didukung oleh program Penanggulangan Kemiskinan. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Sosial DIY selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian; dan
2. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran Dinas Sosial DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	n/a	42,38	40,97	42,17	43,08	44,28	44,28
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	63,40	51,56	51,57	51,58	51,59	51,60	51,60

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penguatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memperluas jejaring dan meningkatkan kinerja pelayanan
			Membangun sinergi lintas mitra yang terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Optimalisasi mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana	Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat (pembentukan KSB, sarasehan keserasian sosial) dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial (tagana, tenaga pelopor perdamaian, tim kampung siaga bencana, difagana)
		Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia	Promosi perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi lansia
		Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat miskin	Promosi kesejahteraan sosial melalui media penyuluhan dan membuka akses bagi warga miskin
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Optimalisasi peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan kapasitas PSKS dan peningkatan nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan, serta kesetiakawanan sosial melalui edukasi kesejahteraan sosial

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Sosial DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**Program Rehabilitasi Sosial**	**30.665.190.300**	**30.665.190.300**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	**8.933.430.900**	**8.933.430.900**	
	Penyedia Permakanan	4.634.560.500	4.634.560.500	
	Penyedia Sandang	1.306.693.000	1.306.693.000	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	350.958.00	350.958.00	
	Penyediaan Alat Bantu	7.523.000	7.523.000	
	Penyedia Perbekalan Kesehatan di dalam panti	577.310.000	577.310.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	1.333.983.000	1.333.983.000	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	569.389.900	569.389.900	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.600.000	3.600.000	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	108.989.500	108.989.500	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.324.000	17.324.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	23.100.000	23.100.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	**4.667.588.000**	**4.667.588.000**	
	Pengasuhan	48.300.000	48.300.000	
	Penyediaan Makanan	1.746.374.500	1.746.374.500	
	Penyediaan Sandang	686.695.500	686.695.500	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	431.513.000	431.513.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	808.822.000	808.822.000	
	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari	32.739.000	32.739.000	
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.200.000	2.200.000	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	776.021.000	776.021.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.800.000	8.800.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	119.523.000	119.523.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	6.600.000	6.600.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**6.643.754.750**	**6.643.754.750**	
	Penyediaan Permakanan	4.042.860.000	4.042.860.000	
	Penyediaan Sandang	570.020.000	570.020.000	
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	100.272.000	100.272.000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	185.483.000	185.483.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	1.110.666.000	1.110.666.000	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	476.813.750	476.813.750	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.600.000	21.600.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.320.000	4.320.000	
	Pemulasaran	131.720.000	131.720.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	**1.132.035.400**	**1.132.035.400**	
	Penyediaan Permakanan	499.930.000	499.930.000	
	Penyediaan Sandang	108.270.000	108.270.000	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	36.145.000	36.145.000	
	Penyedia Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.874.000	10.874.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	168.102.000	168.102.000	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	23.493.000	23.493.000	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	266.801.400	266.801.400	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.000.000	1.000.000	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.400.000	7.400.000	
	Pemulangan ke Daerah Asal	10.020.000	10.020.000	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**9.278.381.250**	**9.278.381.250**	
	Penyediaan Permakanan	3.448.538.000	3.448.538.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Sandang	818.077.000	818.077.000	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	309.557.000	309.557.000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	751.163.750	751.163.750	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	1.761.405.500	1.761.405.500	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	776.374.000	776.374.000	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	1.066.041.000	1.066.041.000	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.560.000	7.560.000	
	Pemulangan ke Daerah Asal	339.665.000	339.665.000	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**12.000.000**	**12.000.000**	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	**12.000.000**	**12.000.000**	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	12.000.000	12.000.000	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**7.633.456.000**	**7.633.456.000**	
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	**643.599.000**	**643.599.000**	
	Pengangkatan Anak antar WNI	618.146.000	618.146.000	
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	25.453.000	25.453.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	**6.989.857.000**	**6.989.857.000**	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.561.420.000	3.561.420.000	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.428.437.000	3.428.437.000	
	Program Penanganan Bencana	**6.660.048.000**	**6.660.048.000**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**6.660.048.000**	**6.660.048.000**	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Permakanan	414.664.000	414.664.000	
	Penyediaan Sandang	33.600.000	33.600.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.119.117.000	4.119.117.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	191.570.000	191.570.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.901.037.000	1.901.037.000	
	Program Pemberdayaan Sosial	**1.173.319.000**	**1.173.319.000**	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	**1.173.319.000**	**1.173.319.000**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.173.319.000	1.173.319.000	
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1	**46.134.013.300**	**46.134.013.300**	
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	**Program Pemberdayaan Sosial**	**1.458.740.000**	**1.458.740.000**	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	**1.458.740.000**	**1.458.740.000**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.458.740.000	1.458.740.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**6.184.871.500**	**6.184.871.500**	
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	**6.184.871.500**	**6.184.871.500**	
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	6.184.871.500	6.184.871.500	
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	**7.643.611.500**	**7.643.611.500**	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**53.777.624.800**	**53.777.624.800**	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**Program Administrasi Perkantoran**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.793.808.900**	**1.793.808.900**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	228.764.000	228.764.000	

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.337.800	242.337.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.995.900	120.995.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	628.562.000	628.562.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.328.200	150.328.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.560.000	31.560.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.261.000	391.261.000	
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**9.135.929.500**	**9.135.929.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.701.000	15.701.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.334.208.900	1.334.208.900	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.763.000	156.763.000	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.629.256.600	7.629.256.600	
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**11.525.344.646**	**11.525.344.646**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.337.830.630	8.337.830.630	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.187.514.016	3.187.514.016	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**10.947.373.592**	**10.947.373.592**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.077.017.900	1.077.017.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.311.166.017	1.311.166.017	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	8.559.189.657	8.559.189.657	

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	dan Bangunan Lainnya			
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**58.150.000**	**58.150.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.950.000	19.950.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.200.000	38.200.000	
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**185.600.000**	**185.600.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.903.000	134.903.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.247.000	24.247.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.450.000	26.450.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**40.711.345.804**	**40.711.345.804**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.683.263.804	40.683.263.804	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.090.000	6.090.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.992.000	21.992.000	
	Total Anggaran Pendukung	**74.357.552.442**	**74.357.552.442**	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	44,28	Triwulan I	15,35
					Triwulan II	19,09
					Triwulan III	32,27
					Triwulan IV	44,28
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,60	Triwulan I	26,56
					Triwulan II	30,92
					Triwulan III	35,29
					Triwulan IV	51,60

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rp8.154.069.750

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
		(APBD)	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (APBD)	Rp12.000.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp643.599.000
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penanganan Bencana (APBD)	Rp2.908.542.000
		Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp3.083.057.000
3.	Program Penanganan Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp3.428.437.000
4.	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	Program Pemberdayaan Sosial (APBD)	Rp2.632.059.000
1.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.874.566.200
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp4.834.556.750
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp38.200.000
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp44.351.786.463
	Jumlah Anggaran		**Rp72.960.873.163**

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
Rp. 6.850.871.810

Pada tahun 2022, Dinas Sosial DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Sosial DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	44,28	Triwulan I	15,35
					Triwulan II	19,09
					Triwulan III	32,27
					Triwulan IV	44,28
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,60	Triwulan I	26,56
					Triwulan II	30,92
					Triwulan III	35,29
					Triwulan IV	51,60

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp8.216.947.750
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (APBD)	Rp12.000.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp643.599.000
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penanganan Bencana (APBD)	Rp6.660.048.000
		Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp3.083.057.000
3.	Program Penanganan Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp3.428.437.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DBH)	Rp958.800.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DAU)	Rp2.602.620.000
4.	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	Program Pemberdayaan Sosial (APBD)	Rp2.632.059.000
5.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.874.566.200
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp4.834.556.750

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp38.200.000
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp40.869.945.804
	Jumlah Anggaran		**Rp76.881.836.504**

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Rp. 6.184.871.500

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. **Manunggal Raharja** merupakan akronim dari **MAN**ajemen Validasi **UNG**gul Berbasis Di**G**it**AL** dengan **R**umah Dat**A** Seja**H**ter**A** Masya**R**akat Jog**JA.** Manunggal Raharja, dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan penting terkait masalah ketidakvalidan data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial. Manunggal Raharja merupakan upaya perbaikan validasi dengan membangun sinergi lintas *stakeholde*r yang memiliki peran vital dalam pengelolaan data kependudukan melalui sebuah kebijakan. Merespon perubahan kebijakan berbagi pakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat, mulai tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mengelola DTKS wilayah dalam rangka melaksanakan mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayah provinsi. Secara teknis upaya ini dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan mengumpulkan data-data hasil verifikasi DTKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang belum masuk dalam DTKS serta melakukan pemeringkatan kesejahteraan. Dengan optimalisasi kewenangan ini, Pemerintah Provinsi dapat berkontribusi lebih nyata dalam upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan DTKS di wilayah DIY yang berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 kewenangan verifikasinya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar II.2. Manunggal Raharja

Sumber:http://manunggalraharja.jogjaprov.go.id/

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Sosial DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Indikator: Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial Meta Indikator: Persentase target	%	n/a	94,96	44,28	47,27	106,75	Sangat Baik	44,28

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2) Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Persentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+%Fakir Miskin+%BRTPD+%BPRSW+%BRSBKL%BPRSR+%BRSPA+%BPSTW dibagi 9								
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<u>Indikator:</u> Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial <u>Meta Indikator:</u> Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2) Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + %karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9	%	63,4	134,99	51,60	65,34	126,63	Sangat Baik	51,60

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2) Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Persentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+%Fakir Miskin+%BRTPD+%BPRSW+%BRSBKL%BPRSR+%BRSPA+%BPSTW dibagi 9

Kinerja Sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial yang merupakan penghitungan komposit dari 9 (sembilan) sub indikator sebagai berikut :

1. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY melaksanakan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan persentase anak bawah lima tahun terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan HIV AIDS, dan korban tindak kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.1 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Rehabilitasi Sosial

No	Jenis PMKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anak Balita Terlantar	1.826	anak	28	1,53	95	5,20
2	Anak Terlantar	14.450	anak	500	3,46	555	3,84
3	Anak Jalanan	327	anak	28	8,56	64	19,57
4	Anak yang Berhadapan Hukum	184	anak	25	13,59	30	16,30
5	Anak dengan Kedisabilitasan	3.095	anak	63	2,07	70	2,26
6	Penyandang Disabilitas	26.177	orang	1.120	4,28	1000	3,82
7	Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	771	orang	190	24,64	235	30,48
8	Orang dengan HIV/AIDS	2.834	orang	7	0,25	0	0,00
9	Korban Tindak Kekerasan	735	orang	14	1,90	1	0,14
Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Rehabilitasi Sosial : (Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)					**=(ABT(5,20%)+ABH(16,30%)+Anjal(19,57%)+ ADK(2,26%)+AT(3,84%)+PD(3,82%)+Gepeng(30,48%)+ODHA(0%)+KTK(0,14%))dibagi 9 = 9,07%**		

❖ ***Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY***

2. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan persentase lanjut usia terlantar, korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang memperoleh pelindungan dan jaminan sosial. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.2 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Jenis PMKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lanjut Usia Terlantar	46.242	Orang	1.400	3,03	2.450	5,30
2	Korban Bencana Alam	150.000	Orang	150.000	100,00	22.100	14,73
3	Korban Bencana Sosial	500	Orang	500	100,00	730	146
Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial : (Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)					**=(Lanjut Usia Terlantar(5,30%)+Korban Bencana Alam(14,73%)+Korban Bencana Sosial(146%)) dibagi 3 = 55,34%**		

3. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.3 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Penanganan Fakir Miskin

No	Jenis PMKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penerima Bantuan UEP PKH Graduasi	33.212	orang	660	1,99	540	1,63
2	Fakir Miskin (Peningkatan Pengurus UEP KUBE dan KM)	367.540	orang	150	0,04	150	0,04
Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Penanganan Fakir Miskin : (Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)					**= (PKH(1,63%)+KUBE, LKM dan USEP(0,04%)) dibagi 2 = 0,83%**		

❖ ***Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY***

4. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas pada Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu wicara, dan werdha disabilitas untuk meningkatkan persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRTPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.4 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRTPD

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri	170	orang	47	27,65	47	27,65

	dan berfungsi sosial (Penyandang Disabilitas)						
Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100%						**= 47/170*100% : 27,65**	

5. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang *(human trafficking)* untuk meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPRSW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.3.5 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSW

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi)	60	orang	29	48,33	29	48,33
Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100%						**= 29/60*100% : 48,33%**	

6. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRSBKL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.6 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat (Gelandangan, Pengemis, Pemulung)	50	Orang	10	20,00	15	30,00
2	Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat (Eks Psikotik)	250	Orang	24	9,60	99	39,6
Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL : (Penanganan gelandangan, pengemis, pemulung dijumlah eks psikotik) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai					**=(15 gepeng dibagi 50 x 100%) + (99 eks psikotik dibagi 250 x 100%) dibagi 2 = 34,80%**		

7. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPRSR dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.7 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (Anak Terlantar/Anak Putus Sekolah)	40	anak	28	70,00	7	17,50
2	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (Anak yang Berhadapan	40	anak	40	100,00	85	212,5

	Hukum)						
Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR : (Penanganan anak terlantar/anak putus sekolah dijumlah eks anak yang berhadapan hukum) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai					**= (7 anak terlantar dibagi 40 x 100%) + (85 anak berhadapan hukum dibagi 40 x 100%) dibagi 2 = 115%**		

8. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRSPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.8 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSPA

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (Anak Balita Terlantar)	25	anak	18	72,00	11	**44,00**
2	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (Anak Terlantar)	80	anak	24	30,00	11	**13,75**
3	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)	35	anak	14	40,00	9	**25,71**
Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR : (Penanganan anak balita terlantar, anak terlantar dijumlah eks					**= ((11 anak balita terlantar dibagi 25 x 100%) + (11 anak terlantar dibagi 80 x**		

anak yang memerlukan perlindungan khusus) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai	**100%) + (9 anak yang memerlukan perlindungan khusus dibagi 35 x 100 %)) dibagi 3 = 27,82%**

9. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar pada Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mempertahankan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan haknya. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPSTW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3.9 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPSTW

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya (Lanjut Usia Terlantar)	214	orang	214	100,00	228	106,54
Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100%						**= ((228 lanjut usia terlantar dibagi 214 x)) 100% = 106,54 %**	

Hasil penghitungan komposit dari 9 (sembilan) sub indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
a. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial	**9,07%**	**47,27%**
b. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**55,34%**	
c. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin	**0,83%**	
d. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	**27,65%**	
e. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	**48,33%**	
f. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	**34,80%**	
g. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	**115%**	

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
h. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	**27,82%**	
i. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	**106,54%**	

Kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	94,96	44,28	47,27	106,75	44,28	106,75

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022

Analisis ketercapaian sasaran terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai berikut :

1. Tercapai 47,27%; dengan demikian persentase realisasi terhadap target 106,75%, maka target tahun 2022 tercapai.
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 11,79%.
3. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Adanya kerja sama yang baik antara di internal Dinas Sosial DIY sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial DIY ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari, Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, dan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti.

Gambar III.1
Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, dan Spritual

Konseling Rutin dengan Pekerja Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Kegiatan belajar anak usia PAUD di Balai RSPA

Outbond Balai RSPA di Tahura Bunder, Gunungkidul

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Vaksinasi bagi Lansia di Balai PSTW

Layanan Kesehatan bagi Lansia di Balai PSTW

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Rutinitas pagi memberikan obat kepada warga binaan sosial

Bimbingan AMT (Achivment Motivation Center) kepada warga binaan sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

Bimbingan Keterampilan bercocok tanam di Balai RSBKL

Pelaksanaan Layanan Konseling

3.1.1.2. Data Dukung Capaian Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 4 (empat) kegiatan, yaitu Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi , dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah.

Gambar III.2

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Homevisit COTA (Calon Orang Tua Asuh) di Cilacap

Rapat Koordinasi Adopsi Anak di DIY

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Sinkronisasi Data Lanjut Usia Terlantar

Rapat Koordinasi Pendataan PMKS dab PSKS

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Dropping Air Bantuan Kekeringan di Kecamatan Nglipar dan Kecamatan Tanjungsari

Simbolis Pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Bumirejo, Kulonprogo

Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar

3.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2) Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + %karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9

Kinerja Sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial diperoleh dari Skor Komposit Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan pemberdayaan sosial guna meningkatkan persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan masyarakat yang mampu menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiaan sosial dalam masyarakat. Capaian hasil pemberdayaan PSKS melalui Program Pengembangan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.6.1 Capaian Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

No	Jenis PSKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerja Sosial Masyarakat	4.767	Orang	95	1,99	275	5,77
2	Taruna Siaga Bencana	1.058	Orang	55	5,20	55	5,20
3	Karang Taruna	438	Orang	345	78,77	416	94,98
4	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	163	Orang	105	64,42	206	126,38
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	Orang	78	100,00	78	100
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	370	lembaga	40	10,81	186	50,27
7	Dunia Usaha	42	lembaga	42	100,00	42	100,00
8	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	349.627	Orang	6.500	1,86	16.603	5,45
9	Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	7	Orang	7	100,00	7	100
Rerata Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan : (Jumlah Persentase hasil pemberdayaan masing-masing jenis PSKS dan masyarakat dibagi jumlah komponen jenis PMKS)					**= (PSM(5,77%)+Tagana(5,20%)+KT(94,98)+ WKSBM(126,38%)+ TKSK(100%)+LKS(50,27%)+Dunia Usaha(100%)+Penanaman Nilai Pahlawan(5,45)+Kesejahteraan Keluarga Pahlawan (100%) dibagi 9 = 65,34%**		

Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY

Kinerja Sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	134,99	51,60	65,34	126,63	51,60	126,63

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022

Analisis Ketercapain Sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sebagai berikut:

1. Tercapai 65,34%; dengan demikian persentase realisasi terhadap target 126,63%, sehingga target tahun 2022 tercapai.
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat penurunan sebesar 8,33%.

3. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Adanya kerja sama yang baik antara di internal Dinas Sosial DIY sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial DIY ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan.

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai, berikut terlampir dokumentasi kegiatan ;

Gambar III.4

Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Penyuluhan Melalui Media Peraga

Penyuluhan Sosial Tingkat Desa

Publikasi Informasi Kesejahteraan Sosial

Publikasi Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Ziarah Rombongan Makan Pahlawan

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2022

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Provinsi yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Provinsi mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 8 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	555	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	753	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	2.028	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	309	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	23.615	100 %	Setiap Tahun

3.2.2 Capaian Kinerja SDGs Dinas Sosial DIY Tahun 2022

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*/Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). MDGs hanya berfokus pada 8 (delapan) tujuan global, sedangkan pada SDGs terdapat penambahan tujuan global lainya berdasarkan isu terkini hingga mencakup 17 (tujuh belas) tujuan global.

Dalam mendukung pencapaian SDGs 2016-2030, Dinas Sosial DIY mendukung pada 1 (satu) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang ada, yaitu pada Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan dengan 4 (empat) indikator didalamnya, yaitu :

1. Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi;
3. Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran; dan
4. Pemulangan Orang Terlantar.

Adapun target dan realisasi indikator SDGs Dinas Sosial DIY tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 9 Target dan Realisasi SDGs Dinas Sosial Tahun 2022

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan							
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
Kode Indikator	**Target / Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
1.3.5	Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial DIY	Jiwa	672	1120	737	Tercapai
1.3.6	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	Dinas Sosial DIY	Jiwa	n/a	660	540	Berdasarkan hasil *assement* dari pendamping PKH, KPM yang layak untuk mengikuti pengembangan sebanyak 540 KPM
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
Kode Indikator	**Target / Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
1.5.5	Bantuan Logistik	Dinas Sosial DIY	Orang	196	200	84	Menyesuaikan korban bencana

	untuk Korban Bencana Kebakaran						kebakaran
1.5.6	Pemulangan Orang Terlantar	Dinas Sosial DIY	Jiwa	323	350	278	Menyesuaikan jumlah orang terlantar yang ada

3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	44,28	47,27	106,75	46.134.013.300	39.013.717.435	84,57	
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan	51,60	65,34	126,63	7.643.611.500	7.274.033.270	95,16	

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sosial							
Jumlah						**53.777.624.800**	**46.287.750.705**	**86,07**	
Program pendukung						**74.357.552.442**	**68.632.313.297**	**92,30**	
Total Belanja						**128.135.177.242**	**114.920.064.002**	**89,69**	

Berdasarkan tabel III.10 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.53.777.624.800 terealisasi Rp.46.287.750.705 atau 86,07%. Sisa anggaran sebesar Rp.7.489.874.095 atau 13,93% antara lain bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi uang saku peserta kegiatan
- Efisiensi tagihan air, listrik, telepon dan kegiatan belanja lain yang menyesuaikan harga pasar
- Efisiensi belanja mobilitas darat, akomodasi dan transportasi menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan
- Efisiensi belanja sewa (tempat, meja, kursi, genset, tenda, *sound system*) menyesuaikan kondisi di lapangan

3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong "*One Agency, One Innovation*". Inovasi yang

diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial DIY Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut :

1. DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana)

Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyebabkan DIY menjadi salah satu dengan 281 titik rawan bencana. Daerah yang terdiri dari lima Kabupaten/ Kota ini memiliki potensi bencana alam maupun bencana sosial yang setiap saat dapat mengancam kehidupan warganya. Anak-anak, perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan terdampak bencana. Kendati demikian, mereka bukan kelompok yang hanya menjadi obyek pelayanan saat terjadi bencana. Mereka pun dapat berperan dalam memberikan bantuan saat terjadi bencana di shelter atau tempat pengungsian, contohnya pada Penyandang Disabilitas.

Dinas Sosial DIY menginisiasi dan membentuk DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana) di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Pundong, Bantul. Pembentukan DIFAGANA merupakan yang pertama di Indonesia dan baru ada di DIY. DIFAGANA adalah bentuk formal keikutsertaan aktif Penyandang Disabilitas, dalam penanggulangan aktivitas penanggulangan bencana. Pembentukan DIFAGANA berangkat dari keyakinan terhadap kemampuan Penyandang Disabilitas dalam aktivitas penanggulangan bencana, bahkan dengan nilai tambah empati dan kepekaan terhadap sesama kelompok rentan dan korban bencana. Saat ini DIFAGANA memiliki 125 personil dari Kabupaten/Kota di DIY dengan berbagai jenis kedisabilitasan dengan sebelumnya diberikan Pelatihan Dasar dan Penguatan Kapasitas oleh para Praktisi, termasuk dari TAGANA DIY.

Dalam kedisabilitasan yang dimiliki, DIFAGANA telah piawai dan mampu mengemban berbagai tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di DIY bahkan berbagai wilayah di Indonesia seperti pada bencana gempa bumi Lombok, serta gempa dan tsunami di Palu. DIFAGANA juga telah mendapatkan Penghargaan TOP 45 INOVASI Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Kementrian PANRB. Dari DIFAGANA, masyarakat dapat belajar bahwa dalam kondisi keterbatasan fisik sekalipun, masih memiliki potensi dan berdaya untuk membantu sesama.

Piagam Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022

2. SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, *Assessment* dan Rehabilitasi Sosial)

Memperhatikan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelaksana rehabilitasi sosial di laksanakan di dalam panti. Dalam pelaporannya, mengikuti Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat *form* urusan pemerintahan bidang sosial yang membutuhkan pemahaman lebih oleh semua pelaku rehabilitasi sosial agar dapat menghasilkan *output* laporan yang sesuai dan maksimal.

Dinas Sosial DIY berinovasi dengan melakukan penyusunan aplikasi SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, *Assessment* dan Rehabilitasi Sosial). Aplikasi SiPersis ini bertujuan untuk menguatkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial sesuai Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, serta penguatan integritas data agar dalam pelaporannya dapat maksimal mengikuti arahan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

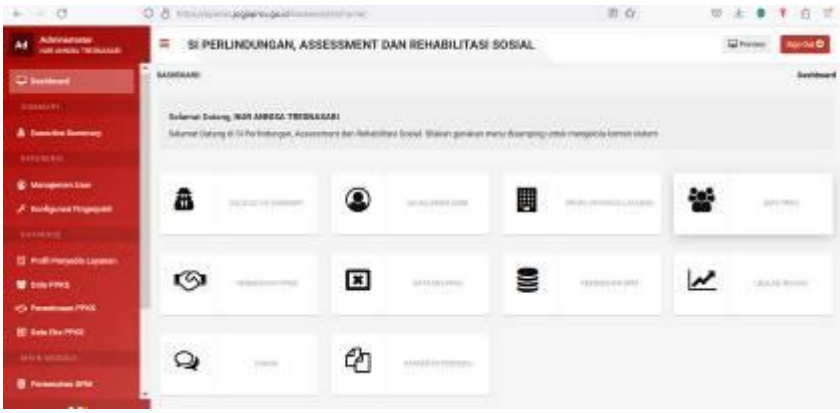

Sumber:http://sipersis.jogjaprov.go.id/

3. Pendaftaran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Daerah

Merespon perubahan kebijakan berbagi pakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat, mulai tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mengelola DTKS wilayah dalam rangka melaksanakan mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayah provinsi. Secara teknis upaya ini dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan mengumpulkan data-data hasil verifikasi DTKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang belum masuk dalam DTKS serta melakukan pemeringkatan kesejahteraan. Dengan optimalisasi kewenangan ini, Pemerintah Provinsi dapat berkontribusi lebih nyata dalam upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan DTKS di wilayah DIY yang berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 kewenangan verifikasinya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota.

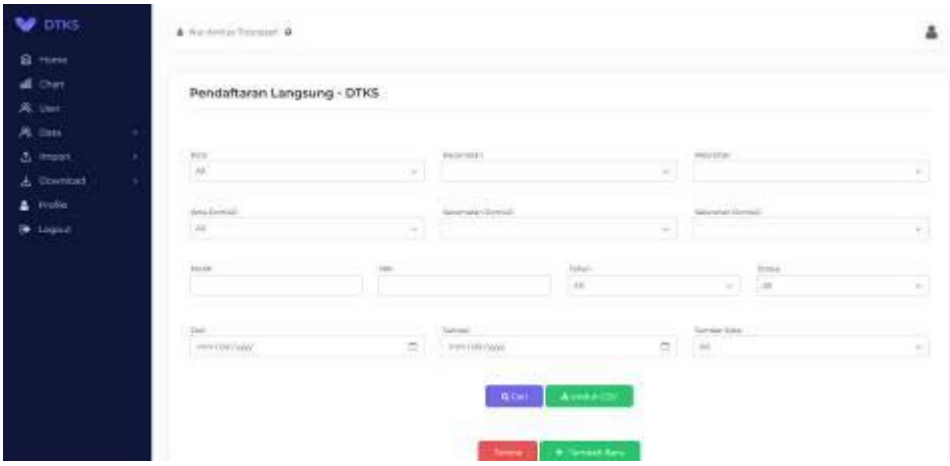

Sumber: http://pendaftaranlangsungdtks.jogjaprov.go.id/

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Sosial DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah *Istimewa* Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah *Istimewa* Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung

Dinas Sosial DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Tabel III.11

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Dinas Koperasi UKM DIY	Dinas Sosial DIY bersama Dinas Koperasi UKM DIY mengadakan pelatihan *digital marketing* untuk para pendamping serta pembinaan lanjutan untuk LKM yang sudah berbadan hukum koperasi		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bagi OPD: Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial
		POLDA DIY	Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan Polda DIY sebagai kegiatan penegakan perijinan UGB, instruktur bimbingan sosial di *Camp Assesment* dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS)			
		Paksikaton (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton)	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Paksikaton (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton) memberikan edukasi pada gelandangan dan pengemis di titik-titik rawan gepeng			
		Baznaz DIY	Dinas Sosial DIY bekerja sama			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Baznaz Sleman	dengan Baznas DIY dan Baznas Sleman untuk pemberdayaan PPKS Dinas Sosial DIY sebagai pemberian modal usaha dalam rangka pemberdayaan bagi PPKS			
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi, dan peran PSKS	PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan PINBUK dalam pendampingan usaha untuk Pemasaran Online dan Pengelolaan Usaha		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bagi OPD: Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial
		Kapanewon Kalurahan	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Kapanewon dan Kalurahan untuk membantu menghadirkan peserta dalam kegiatan sebagai upaya / fasilitator untuk penyampaian program/kegiatan Dinas Sosial DIY kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi bersama dalam penanganan permasalahan sosial di DIY			
		PSKS yang terdiri : 1. Pekerja Sosial Profesional, Fungsional, dan Masyarakat	Bekerja sama dalam melakukan penanganan PMKS			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		2. Taruna Siaga Bencana 3. LKS 4. Karang Taruna 5. LK3 6. Keluarga Pionir 7. WKSBM 8. Penyuluh Sosial Masyarakat 9. Penyuluh Sosial Fungsional 10. TKSK 11. Dunia Usaha				

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :
1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2022, indikator kinerja presentasi PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial tercapai dengan persentase 106,75%, dan untuk indikator kinerja presentasi PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial tercapai dengan persentase 126,63%.
2. Dua indikator utama berhasil tercapai, bahkan melebihi target 100%. Keberhasilan ketercapaian dua indikator kinerja sasaran tidak lepas dari adanya kerja sama yang baik antara di internal Dinas Sosial DIY sendiri. Serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial DIY ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Menyempurnakan sistem pengelolaan data DTKS Daerah melalui Manunggal Raharja. Data ini nantinya digunakan untuk integrasi data kesejahteraan sosial dari berbagai sumber, sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dioptimalkan terkait pemanfaatannya dan prioritas intervensi.
2. Memaksimalkan peran orang tua (keluarga) dalam upaya mengatasi permasalahan sosial anak sedini mungkin melalui bimbingan edukasi, sosialisasi dan motivasi sehingga permasalahan seperti anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus bisa berkurang. Di samping itu juga harus

selalu berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, seperti lembaga perlindungan anak yang ada, kepolisian dan masyarakat terhadap permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat sehingga solusi pemecahan masalahnya bisa segera diatasi.

3. Memaksimalkan peran Tagana, Difagana, Pordam, masyarakat, dan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat di daerah rawan bencana dalam hal penanganan bencana mulai dari pra, saat, dan pasca terjadinya bencana.
4. Memberikan penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial pada generasi muda terutama anak-anak sekolah melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
5. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam balai sehingga kebutuhan dasar, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial warga binaan balai dapat terpenuhi sesuai dengan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi yang baik dalam kolaborasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial DIY yang terdiri dari Pemerintahan, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Sosial DIY secara lebih intensif.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	42,38	40,97	42,17	43,08	44,28	44,28
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,56	51,57	51,58	51,59	51,60	51,60

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦮꦤꦺꦴꦱꦶꦮꦤꦺꦴꦱꦶꦮꦤ

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Sosial DIY
Jabatan : Kepala Dinas Sosial DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	44,28	Triwulan I	15,35
					Triwulan II	19,09
					Triwulan III	32,27
					Triwulan IV	44,28
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,60	Triwulan I	26,56
					Triwulan II	30,92
					Triwulan III	35,29
					Triwulan IV	51,60

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp. 8.216.947.750
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (APBD)	Rp. 12.000.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp. 643.599.000
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penanganan Bencana (APBD)	Rp. 6.660.048.000
		Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp. 3.083.057.000
3.	Program Penanganan Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp. 3.428.437.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DBH)	Rp. 958.800.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DAU)	Rp. 2.602.620.000
4.	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	Program Pemberdayaan Sosial (APBD)	Rp. 2.632.069.000
5.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 2.874.586.200
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 4.834.566.750
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 38.200.000

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 40.869.945.804
	Jumlah Anggaran		Rp. 76.681.836.504

1. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Rp. 6.184.871.500 ,-

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

DISSOS

ENDANG FATMINTARSIH, SH, M.Si
NIP. 196604041993032007

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2021

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id
website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id/ Kode Pos 55286

Yogyakarta, 21 - 03 - 2022.

Nomor : 700/01197
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Sosial DIY TA. 2021

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial DIY dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi subkomponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi subkomponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
   b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
      1) Pemenuhan Pengukuran;
      2) Kualitas Pengukuran;
      3) Implementasi Pengukuran.

b. Aspek...

c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:

1) Pemenuhan Pelaporan;

2) Penyajian Informasi Kinerja;

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

d. Evaluasi Internal meliputi:

1) Pemenuhan Evaluasi;

2) Kualitas Evaluasi;

3) Pemanfaatan Evaluasi.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:

1) Kinerja yang dilaporkan (*Output*);

2) Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*)

3) Kinerja yang dilaporkan (IKU);

4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Sosial DIY memperoleh nilai sebesar *84,69 kategori A* dengan interpretasi *Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel*;

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial DIY dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,57 atau 85,23% dari bobot sebesar 30%;

b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,57 atau 90,28% dari bobot sebesar 25%;

c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,47 atau 83,13% dari bobot sebesar 15%;

d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,25 atau 82,50% dari bobot sebesar 10%;

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,83 atau 79,17% dari bobot sebesar 20%.

5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu Dinas Sosial DIY telah melakukan perbaikan berupa upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) Tahun 2021 terutama pada kegiatan Penyedia Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran; kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin; kegiatan Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar; kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional/Taman Makam Pahlawan (TMPN/TMP), Museum Pahlawan Pancasila/Museum Pahlawan Nasional (MPP/MPN) dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan; selain itu pada Tahun 2021 Dinas Sosial DIY juga mendapatkan 4 (empat) penghargaan, yaitu Juara 1 Lomba

Manajemen *Shelter*; Juara 1 Lomba Manajemen Dapur Umum; Penghargaan Kategori OPD Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2021; Kategori OPD Terbaik ke-3 pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2021.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial DIY beserta seluruh jajarannya agar melakukan tindakan perbaikan sebagai berikut :
   - Meningkatkan pencapaian target kinerja (*output*), khususnya *output* kegiatan yang tidak tercapai di Tahun 2021 yaitu antara lain:
     1) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, khususnya terkait capaian keluaran Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/Penugasan WC *Camp Assesment*;
     2) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, khususnya terkait capaian keluaran Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia;
     3) Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Pelayanan Reunifikasi ke Keluarga Klien RPS
     4) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Covid-19 di *Shelter*
     5) Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, khususnya terkait capaian keluaran Fasilitasi Perawaan Jenazah Terlantar; Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan; Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan;
   - Meningkatkan pencapaian target kinerja IKU Tahun 2022 terutama pada indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial agar lebih baik dari Tahun 2021;
   - Melakukan upaya untuk mempertahankan penghargaan-penghargaan lainnya dari *Stakeholder*, minimal 3 (tiga) penghargaan.

Demikian..

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Sosial DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIL. INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUMADI, S.H., M.H.
NIP 19630826 198903 1 007[illegible]

Tembusan:
Kepala Dinas Sosial DIY.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01197 tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Sosial DIY TA.2021 Rekomendasi: Kepala Dinas Sosial DIY beserta seluruh jajarannya agar melakukan tindakan perbaikan sebagai berikut : 2. Meningkatkan pencapaian target kinerja *(output)*, khususnya *output* kegiatan yang tidak tercapai di Tahun 2021 yaitu antara lain : • Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, khususnya terkait capaian keluaran Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/Penugasan WC *Camp Assesment*; • Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, khususnya terkait capaian keluaran Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia; • Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Pelayanan Reunifikasi ke Keluarga Klien RPS; • Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Covid-19 di *Shelter*; • Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, khususnya terkait capaian keluaran Fasilitasi Perawatan Jenazah Terlantar, Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal	Dinas Sosial DIY melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) Tahun 2022 dengan langkah-langkah: 1. Pada Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, khususnya terkait capaian keluaran Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/ Penugasan WC *Camp Assesment* terjadi kesalahan pengentrian dalam Aplikasi Sengguh. Seharusnya pada keluaran Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor/Pengurasan WC *Capm Assement* target 10 kali dan terealisasi 10 kali, namun tertentri di Aplikasi Sengguh target 10 kali realisasi 5 kali. 2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, khususnya terkait capaian keluaran Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia dari target 5 lokasi terealisasi 2 lokasi, hal ini dikarenakan mengikuti SE Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penundaan Kegiatan Berpotensi Menimbulkan Kerumunan dan mengikuti Instruksi Gubernur DIY No. 17/INTSR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). 3. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Pelayanan Reunifikasi ke Keluarga Klien RPS dari target 23 orang hanya terealisasi 12 orang, hal ini dikarenakan pelayanan reunifikasi

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	untuk melanjutkan perjalanan, Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan. 4. Meningkatkan pencapaian target kinerja IKU Tahun 2022 terutama pada indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial agar lebih baik dari Tahun 2021; 5. Melakukan upaya untuk mempertahankan penghargaan-penghargaan lainnya dari *stakeholder*, minimal 3 penghargaan.	ke keluarga Klien RPS tidak dapat diprediksi, menyesuaikan kondisi atau kebutuhan reunifikasi yang ada. 4. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Covid-19 di *Shelter* dari target 46 lokasi terealisasi 36 lokasi. Realisasi yang tidak sesuai dengan target ini dikarenakan kasus Covid-19 di DIY sudah mulai menurun, sehingga tidak banyak penyintas yang ada di *shelter,* serta banyak yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. 5. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, khususnya terkait keluaran Fasilitasi Perawatan Jenazah Terlantar target 30 orang realisasi 13 orang, Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan target 286 orang realisasi 206 orang, dan Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan target 850 tangki realisasi 466 tangki merupakan kejadian yang tidak bisa di prediksi untuk pencapaiannya, dan sifatnya persediaan. 6. Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial tahun 2022 tercapai dengan persentase 106,75% dengan target 44,28% dan realisasi 47,27%. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 11,79%.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		7. Tahun 2022, Dinas Sosial DIY mendapatkan 3 penghargaan, yaitu: • Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 atas inovasi Difagana (Difabel Siaga Bencana) sebagai Pionir Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi oleh Kementerian PAN RB. • Penghargaan Kategori OPD Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 28 September 2022. • Penghargaan Ucapan Terima kasih oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Sosial DIY atas dukungan dan kontribusinya dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Kepala Dinas Sosial DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISSOS

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si

NIP. 19660404 199303 2 007

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA